



FENOMENA *CHILDFREE* DI JEPANG DALAM PERSPEKTIF TEORI FEMINISME EKSISTENSIALIS

Mika Ela¹, Aisyah Savira², Nabila Utami Sandra Dewi³, Febi Triyanti⁴

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Email: mikaella281000@gmail.com¹, Asavira5@gmail.com², Nblausd15@gmail.com³,
febity62@gmail.com⁴

Artikelinfo

Artikel history:

Diterima: 20 November 2022

Diterima dalam bentuk revisi: 22 Desember 2022

Diterbitkan: 23 Desember 2022

Kata Kunci:

Childfree, Pemerintah Jepang, Teori feminisme eksistensialis

Abstrak

*Childfree merupakan sebuah keputusan untuk tidak memiliki anak secara sukarela, baik laki-laki atau perempuan lajang maupun juga oleh pasangan yang sudah menikah. Contohnya masyarakat Jepang mewajarkan pilihan tersebut, namun Pemerintah Jepang yang menolak keputusan *childfree* sehingga mengupayakan berbagai program demi meningkatkan tingkat kelahiran di negaranya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research) dari buku-buku dan literatur lainnya seperti jurnal dan artikel. Hasil penelitian ini menemukan bahwa menurut penulis dalam feminisme eksistensialis di lingkup domestik yakni dalam rumah tangga dan ruang kerja. Pemerintah Jepang dapat mengupayakan lingkungan kerja yang sehat dengan jam kerja yang tidak terlalu panjang dan beban kerja yang tidak terlalu berat. Serta mensosialisasikan kesetaraan gender agar perempuan di Jepang tidak perlu mengorbankan karirnya saat ia telah menikah dan memiliki anak.*

Corresponden author: Nabila Utami Sandra Dewi

Email: Nblausd15@gmail.com

Pendahuluan

Secara biologis, gender dikelompokkan menjadi dua yaitu laki-laki dan perempuan. Terdapat perbedaan mendasar mengenai karakter fisik antara kedua kelompok gender tersebut, seperti alat kelamin laki-laki yang disebut sebagai penis dan alat kelamin milik perempuan yang disebut sebagai vagina, lalu perempuan memiliki rahim sehingga dapat hamil dan memproduksi susu dari payudara mereka sedangkan laki-laki tidak memiliki kemampuan tersebut. Kemampuan untuk hamil dan menyusui yang hanya dimiliki oleh perempuan, di banyak kelompok masyarakat yang tersebar di berbagai belahan dunia menghasilkan pandangan tradisional di mana nantinya semua perempuan harus dapat hamil, melahirkan, dan menyusui anak-anak mereka (Hajir, 2020).

Pandangan seperti ini telah lama ada dan diyakini oleh banyak orang termasuk diinternalisasi oleh perempuan itu sendiri. Perempuan yang menginternalisasi hasil dari konstruksi sosial ini memiliki pandangan bahwa menikah dan memiliki anak merupakan sebuah pencapaian yang harus mereka peroleh supaya mereka dapat dipandang oleh masyarakat sebagai perempuan yang sesungguhnya. Hal tersebut membuat perempuan tidak menyadari bahwa apa yang ada di tubuh mereka merupakan otoritasnya sendiri dan tidak ada seorang pun yang seharusnya mengatur itu. Keputusan untuk hamil dan melahirkan sepenuhnya ada di tangan perempuan, hal itu merupakan sebuah pilihan dan bukan kewajiban seperti yang selama ini terbangun di dalam kehidupan sosial masyarakat mengenai perempuan. Hamil dan melahirkan memang hanya dapat dilakukan oleh perempuan, namun keputusan untuk itu merupakan pilihan dan bukan kewajiban karena dua hal tersebut merupakan momen yang sangat besar, dibutuhkan kesiapan fisik dan mental untuk menghadapi kehamilan dan melewati proses melahirkan. Semua proses tersebut hanya dapat dirasakan oleh perempuan sehingga memaksakan kehamilan kepada perempuan dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk kekerasan karena tidak semua perempuan mampu hamil meskipun mereka memiliki rahim dan tidak semua perempuan ingin hamil. Pandangan masyarakat mengenai perempuan yang tidak memiliki anak sebagai perempuan yang tidak utuh justru menunjukkan fakta bahwa perempuan dipandang sebagai objek pemberi keturunan.

Perempuan memang masih banyak yang tidak menyadari bahwa hamil dan memiliki anak merupakan sebuah pilihan. Hal ini terjadi karena masih banyaknya kelompok masyarakat yang melanggengkan budaya patriarki dan memberi stereotype untuk perempuan atau berpikir secara seksis. Bahkan yang menyedihkan perempuan juga ikut meyakini pandangan yang seksis dan patriarki tersebut sehingga membuat banyak kalangan perempuan tidak menyadari hak-hak mereka. Beruntungnya dalam beberapa dekade ini kesadaran perempuan mengenai hak-hak mereka mulai meningkat. Sudah cukup banyak perempuan yang menyadari bahwa mereka sendirilah yang memiliki hak kontrol atas tubuh mereka oleh karena itu hamil dan melahirkan menjadi pilihan yang harus diputuskan sendiri oleh perempuan. Meningkatnya kesadaran pada perempuan mengenai hak-hak yang mereka miliki, terutama pada keputusan memiliki anak membuat beberapa perempuan secara berani mengambil keputusan untuk *childfree* atau tidak memiliki anak karena pilihan secara sukarela. Istilah *childfree* sering kali disandingkan dengan istilah *childless*, kedua istilah ini memang mempunyai dasar yang sama mengenai keputusan untuk tidak memiliki anak namun yang membedakan ialah *childless* tidak didasari oleh pilihan secara sukarela tetapi karena faktor kesehatan. Perempuan tidak hanya menjadi kelompok yang mengambil keputusan untuk *childfree*, tetapi ada juga beberapa kelompok laki-laki dan pasangan yang telah menikah yang mengambil keputusan tersebut. Faktor-faktor yang biasanya melatarbelakangi keputusan seseorang atau pasangan untuk *childfree* yakni faktor lingkungan, ekonomi, psikologis seperti adanya trauma masa kecil, dan dunia yang semakin kejam.

Pembahasan mengenai *childfree* di Indonesia baru-baru ini muncul dan menuai banyak perdebatan di kalangan masyarakat. Pembahasan mengenai *childfree* di Indonesia mulai terangkat saat salah seorang *influencer* Indonesia yang tinggal di Jerman yaitu Gita Savitri secara terbuka menyatakan dirinya dan suami memutuskan untuk tidak memiliki anak. Alasan Gita dan suami untuk tidak memiliki anak karena ia berpandangan bahwa ada atau tidak adanya anak adalah pilihan hidup dan perencanaan matang diperlukan karena memutuskan untuk

mempunyai anak merupakan tanggung jawab besar. Beberapa orang menanggapi keputusan Gita dengan positif, menyetujui pandangannya bahwa memiliki anak memang bentuk tanggung jawab yang besar dan tidak semua orang mampu untuk menanggung tanggung jawab sebagai orang tua, oleh karena itu rencana yang matang sangat dibutuhkan. Kelompok kontra juga muncul dan menganggap bahwa keputusan tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang Gita dan suami anut serta keputusannya dianggap terlalu idealis dan liberal (Tim detikcom, 2021). Konsep mengenai *childfree* di Indonesia memang masih terdengar baru, aneh, dan justru terkesan sebagai sesuatu yang negatif, tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang cenderung masih konservatif. Di negara-negara lain keputusan untuk *childfree* justru sudah menjadi sesuatu yang biasa, contohnya saja seperti pada salah satu negara di kawasan Asia Timur yaitu Jepang.

Turunnya jumlah populasi di Jepang selama lima tahun (2015-2020) terakhir ini ditengarai karena semakin banyaknya penduduk Jepang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Dalam lima tahun terakhir (2015-2020), Jepang mengalami penurunan jumlah populasi mencapai 948.646 atau 0,7% sehingga di tahun 2020 total populasi Jepang hanya 126.146.099 dengan 23% diantaranya adalah kelompok lansia. Selama 47 tahun terakhir Jepang telah mengalami penurunan rasio penduduk usia anak dan di tahun 2021 mencapai titik terendahnya yakni 11,9%. Berdasarkan Buku Tahunan Demografis PBB, Jepang menjadi negara dengan rasio populasi anak terendah di kelompok negara dengan jumlah populasi penduduk 40 juta ke atas. Pemerintah Jepang bahkan mengeluarkan berbagai langkah seperti memberi tunjangan sebesar Rp 36,7 juta untuk hamil dan melahirkan. Meningkatnya jumlah pernikahan di Jepang pada 2019 yang mencapai angka 598,965 setelah selama tujuh tahun mengalami penurunan, juga sepertinya tidak terlalu mempengaruhi jumlah populasi di sana (Novia Aisyah-detikedu, 2021).

Pilihan untuk tidak memiliki anak di Jepang sebenarnya telah menjadi sesuatu yang biasa di kalangan orang dewasa dan pasangan muda. Sebelum konsep mengenai *childfree* ramai dibahas oleh masyarakat, Jepang bahkan telah memiliki konsep serupa yang muncul pada akhir 1980 namun dengan sebutan yang berbeda yakni *Double Income No Kid* (DINK). DINK merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan kondisi untuk pasangan yang menikah namun dengan pengelolaan penghasilan yang dipisah dan tidak ingin memiliki anak. Keputusan *childfree* di Jepang menjadi cukup umum karena banyaknya faktor yang mempengaruhi seperti tingginya biaya hidup, kehidupan yang sangat dinamis, dan stigma yang diterima oleh perempuan dari masyarakat Jepang. Faktor tersebutlah yang membuat beberapa orang di Jepang baik laki-laki, perempuan, bahkan pasangan yang telah menikah memutuskan untuk memiliki anak. Banyaknya masyarakat Jepang memandang bahwa kehadiran anak tidak hanya membawa kebahagiaan tetapi juga secara bersamaan membawa tanggung jawab seumur hidup yang berat sehingga dibanding tidak dapat memberikan anak yang hadir apa yang nantinya dibutuhkan dan kemudian masyarakat Jepang memilih untuk tidak memiliki anak sama sekali.

Seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa memiliki anak membutuhkan perencanaan yang matang dan kesiapan fisik serta mental yang baik, membuat keputusan mengenai *childfree* sebenarnya tidak dapat disalahkan. Selain karena keputusan tersebut

merupakan hak setiap orang terutama hak perempuan, memaksakan kehamilan dan kehadiran anak justru dapat menyebabkan anak menjadi korban ketidaksiapan orang tua. Sehingga keputusan *childfree* sebenarnya menjadi salah satu tindakan yang dapat menghindari terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak. Sayangnya keputusan ini masih dipandang sebagai sesuatu yang negatif bahkan egois bagi beberapa orang, bahkan di Jepang sendiri yang sebenarnya di kalangan generasi muda hal tersebut sudah biasa.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan metode studi pustaka (library research) dari buku-buku dan literatur lainnya seperti jurnal dan artikel. Menurut Denzin dan Lincoln (Moleong, 2012:5) penelitian kualitatif menggunakan latar ilmiah dan melibatkan berbagai metode seperti wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk menggambarkan fenomena yang terjadi¹. Penelitian ini mengkaji mengenai makna serta uraian Fenomena *Childfree* di Jepang dalam Perspektif Teori Feminisme Eksistensialis. Peneliti memahami, mengumpulkan, mencatat, menguraikan secara deskriptif analitis berbagai dasar fenomena *childfree* untuk mendapatkan dan melengkapi gambaran secara menyeluruh tentang fenomena *childfree* di Jepang.

Hasil dan Pembahasan

a. *Childfree* dalam Masyarakat Jepang

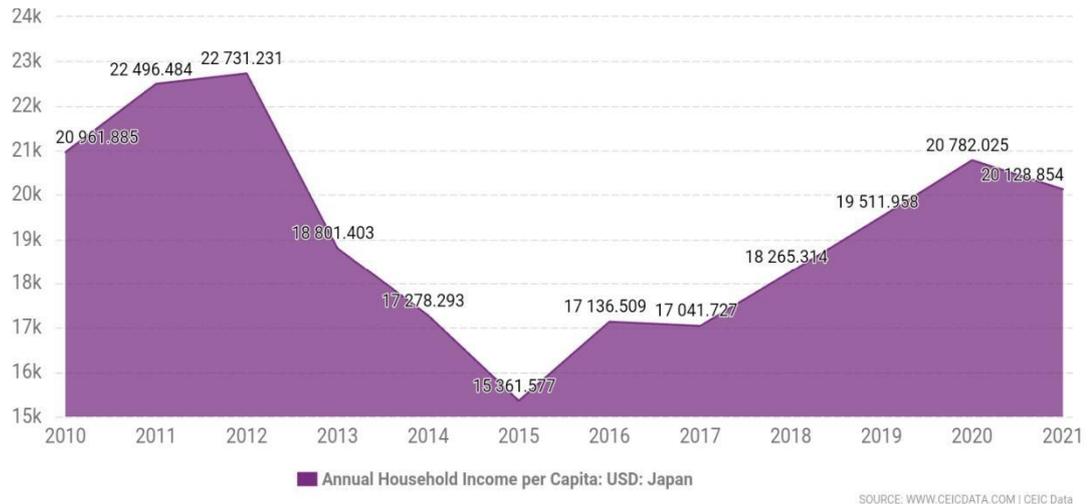
Jepang dapat dikatakan sebagai negara yang mayoritas penduduknya sudah modern. Modern yang dimaksud tidak hanya dalam bidang teknologi, namun juga pola pikir mereka yang sudah maju. Salah satu prinsip yang dipegang oleh masyarakat Jepang adalah bagaimana mereka berdedikasi terhadap profesi mereka. Jepang juga memiliki kinerja yang baik dalam beberapa ukuran kesejahteraan menurut *Better Life Index*. Jepang menjadi salah satu negara yang menempati urutan teratas dalam keamanan pribadi dengan skor 8,4. Hal tersebut merupakan peringkat di atas rata-rata OECD (*the Organization for Economic Co-operation and Development*) dalam pendapatan dan kekayaan, pendidikan dan keterampilan, pekerjaan dan pendapatan, perumahan, keamanan pribadi, dan kualitas lingkungan. Namun Jepang masih menempati peringkat di bawah rata-rata dalam hal keterlibatan sipil, kesejahteraan subjektif, koneksi sosial, keseimbangan kehidupan kerja dan status kesehatan.

Di Jepang, pendapatan rumah tangga rata-rata yang disesuaikan dengan pendapatan bersih per kapita adalah \$29.798/tahun, jauh di bawah rata-rata OECD sebesar \$33.604/tahun. Ada kesenjangan besar antara yang terkaya dan termiskin, dengan 20% populasi terkaya berpenghasilan enam kali lebih banyak daripada 20% termiskin.

Gambar 1.1 pendapatan bersih per kapita Masyarakat Jepang

¹ Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Mycological Research.

FENOMENA CHILDFREE DI JEPANG DALAM PERSPEKTIF TEORI FEMINISME EKSISTENSIALIS



Dalam hal pekerjaan, 75% dari usia 15-64 tahun di Jepang bekerja dengan bayaran, lebih tinggi dari rata-rata OECD sebesar 68%. Sekitar 83% pria bekerja untuk mendapatkan bayaran, dibandingkan dengan 67% wanita. Di Jepang, persentase karyawan yang bekerja berjam-jam adalah 11% lebih tinggi dari rata-rata OECD. Pekerja perempuan dalam ketenagakerjaan internal memiliki struktur tersendiri. Jika ada pekerjaan full time, maka terdapat dua kategori dari pekerja perempuan diantaranya adalah: Pekerja perempuan yang harus bekerja layaknya laki-laki. Ini dinamakan Sogo Shoku (all round employes). Pekerja perempuan harus bekerja lembur serta mau untuk ditempatkan di tempat kerja yang jauh untuk beberapa tahun. Mereka juga diharapkan bekerja tanpa interupsi atau penghambat, salah satunya yakni ketika masuk dalam fase memiliki atau membesarkan anak.

b. Pekerja perempuan yang tidak berperan penting dalam perusahaan atau tempat kerja, serta memiliki gaji yang cukup rendah. Mayoritas pekerja perempuan yang ada di posisi ini adalah mereka yang memiliki anak. Pekerja perempuan ini akan sulit untuk naik jabatan, bahkan kesempatan menduduki posisi penting dalam perusahaan atau tempat kerja tersebut.

Hingga pada tahun 1985 disahkan ketentuan Equal Oportunity Law dan Child-care Leave pada tahun 1992 yang memudahkan perempuan dalam mendapatkan pekerjaan. Ketentuan ini diharapkan dapat mewujudkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam mendapatkan pekerjaan. Perusahaan juga diminta agar mengizinkan perempuan mendapatkan cuti melahirkan dan membesarkan anak. Namun pada kenyataannya, perusahaan tetap tidak memberikan izin pada perempuan untuk cuti. Sehingga perempuan banyak yang bingung jika disuruh memilih antara keluarga atau pekerjaan.

Pendidikan dan keterampilan yang baik merupakan syarat penting untuk mendapatkan pekerjaan. Jepang adalah negara dengan kinerja terbaik dalam hal kualitas sistem pendidikannya. Di Jepang, persentase orang dewasa dengan usia 25-64 yang telah menyelesaikan pendidikan menengah atas, berada di atas rata-rata OECD sebesar 78%. Rata-rata siswa mendapat skor 529 dalam literasi membaca, matematika, dan sains dalam *the OECD's Programme for International Student Assessment (PISA)*. Skor ini jauh lebih tinggi daripada rata-rata OECD sebesar 486. Meskipun anak perempuan mengungguli anak laki-laki

di banyak negara OECD, di Jepang anak laki-laki mendapat skor 2 poin lebih tinggi daripada rata-rata anak perempuan.

Dengan demikian, masyarakat Jepang banyak yang mendukung konsep *childfree*. Banyak pasangan muda yang memilih untuk tidak memiliki keturunan dengan alasan masing-masing. Alasan yang paling mendasar yakni masyarakat Jepang ingin dan sedang bekerja secara produktif. Sehingga kehadiran anak akan mengganggu mereka. Jam kerja juga menjadi salah satu alasan mengapa mereka memilih untuk tidak memiliki anak. Di Jepang jam kerja normal pegawai dimulai dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore hari dan beberapa mulai bekerja dari jam 9 pagi hingga jam 6 sore.

Masyarakat Jepang pun sadar bahwa memiliki anak bukanlah sesuatu hal yang sepele. Memiliki anak artinya mereka akan memiliki tanggung jawab yang besar. Memiliki anak bukan hanya sebatas melahirkan, namun juga orang tua berperan besar dalam membentuk kepribadian dan karakter anak. Bagaimana orang tua mampu untuk mengajarkan anak mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Ini bukan menjadi hal yang sepele. Didikan orang tua adalah hal yang pertama dan penting. Jika orang tua gagal mendidik anak, maka ini akan berpengaruh terhadap masa depan si anak. Jika membahas mengenai agama, maka orang tua nantinya yang akan bertanggungjawab jika perilaku anak menjadi buruk dan salah. Sadar bahwa membesarkan anak adalah tanggung jawab besar, dan orang Jepang banyak berpikir sebelum membuat keputusan. Ini merupakan pemikiran yang sepenuhnya benar, karena terdapat banyak negara yang penduduknya banyak memiliki anak namun orangtua mereka tidak mampu untuk mendidik mereka, atau sejenak meluangkan waktu untuk menghabiskan waktu bersama mereka. Ketidaksetaraan gender juga menjadi salah satu alasan mengapa perempuan di Jepang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Selama ini perempuan menjadi pihak di dalam keluarga yang mengambil peran ganda untuk mengurus rumah dan anak sehingga sering kali perempuan harus merelakan karir yang selama ini sudah di bangun, sedangkan laki-laki sering tidak berkontribusi pada urusan pekerjaan rumah dan anak. Wanita Jepang seringkali harus memilih antara karir dan keluarga. Menurut beberapa statistik, sekitar 70% wanita Jepang pada dasarnya terpaksa berhenti bekerja setelah mempunyai anak pertama.

Pola pikir masyarakat Jepang yang tidak ingin memiliki anak juga dikarenakan mereka telah memikirkan berapa besar biaya hidup yang perlu dikeluarkan untuk membesarkan anak. Setiap tahun dan seiring berjalannya waktu, zaman akan terus berkembang, sehingga biaya yang akan mereka keluarkan pun akan meningkat. Jepang secara konsisten menjadi salah satu negara dengan biaya hidup rata-rata tertinggi di dunia. Pengeluaran harian dapat dengan mudah mencapai 280.000–300.000 JPY (Rp 35.932.500- Rp 38.807.100) per bulan. Ini dikarenakan tiga faktor yakni letak geografis negara karena Jepang yang berjarak 124 mil dari daratan Asia, budaya masyarakat Jepang, dan wilayah Tokyo. Hal itu menyebabkan banyak barang kebutuhan sehari-hari yang harus diimpor agar tingkat kuantitas barang menjadi lebih tinggi dari harga sebelumnya. Contohnya seperti sebagian besar produk susu yang harus diimpor terlebih dahulu. Ekspatriat (masyarakat yang hidup atau menetap di Jepang, namun bukan warga asli Jepang) mungkin menemukan barang-barang yang ada di Jepang dengan kuantitas jauh sekiranya harga dua atau tiga kali lebih mahal daripada di wilayah Eropa atau di wilayah Amerika Utara maupun Selatan. Budaya Jepang yang menghargai barang dan jasa berkualitas tinggi juga menjadi faktor tingginya biaya hidup di Jepang. Barang-barang dari makanan hingga pakaian hingga elektronik harus berkualitas tinggi, seperti halnya layanan di industri

makanan, perhotelan, dan lainnya. Berharap untuk hal-hal baik ini datang dengan harga yang mahal.

Salah satu kota di Jepang yang dianggap sebagai kota paling mahal ialah Tokyo. Ibukota negara Jepang ini secara terus menerus menduduki peringkat sebagai kota paling mahal di dunia. Sebagai kota terpadat di Jepang, biaya kota yang tinggi mempengaruhi seluruh negara. Untuk Satu orang yang menetap di Tokyo dapat menghabiskan biaya mencapai sekitar 120.000 JPY (Rp 15.810.300) per bulan, angka tersebut belum termasuk biaya sewa apartemen. Jika suatu ketika harga nominal sewa rata-rata untuk apartemen satu kamar menjadi naik dengan tinggi, misal biaya sewa dapat naik hingga mencapai 245.000 JPY (Rp 31.620.600), sebuah keluarga yang tinggal di Tokyo akan memerlukan biaya tiga kali lipat.

Biaya hidup yang sedemikian mahal dan keputusan untuk memiliki anak berarti pasangan akan bersedia untuk mengeluarkan biaya hidup yang jauh lebih banyak lagi. Membangun rumah tangga berarti biaya yang akan dikeluarkan dua kali lebih banyak dari kehidupan sebelum menikah. Apalagi jika mereka memiliki anak, maka biaya yang dikeluarkan akan juga ikut meningkat seiring dengan penambahan jumlah anak atau penambahan usia anak dalam suatu keluarga. Biaya sekolah yang mahal, biaya kehidupan sehari-hari dimana setiap aspek dalam kehidupan akan semakin mahal. Bahkan sebelum melahirkan juga membutuhkan biaya untuk check up atau periksa kehamilan, ketika melahirkan, dan setelah melahirkan pun akan ada biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan juga akan meningkat jika ada biaya pengeluaran untuk perawatan kesehatan, mendukung hobi sang anak, terkadang juga butuh les tambahan untuk anak, dll. Sehingga ini mengakibatkan masyarakat Jepang dituntut untuk giat bekerja. Mereka akan fokus dan lebih sibuk untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Faktor lainnya adalah masyarakat Jepang kurang berminat pada seks. Kurangnya minat pada seks dikenal dengan *sekkusu shinai shokogun* atau "*celibacy syndrome*". Lebih dari 50% populasi tidak berhubungan seks hingga satu bulan. Bahkan orang Jepang yang sudah menikah mengatakan jarang berhubungan seks karena mereka tiba di rumah dalam keadaan lelah dari pekerjaan mereka atau hanya tidak berminat. Ini adalah faktor lain mengapa banyak pasangan yang tidak memiliki anak. Mereka terlalu berambisi untuk mendapatkan penghasilan dan ditekan oleh keadaan sekitar. Sejak pertengahan 1990-an, ekonomi Jepang mengalami stagnasi dan harga-harga menjadi semakin naik. Hal ini membuat semakin sulit bagi kaum muda untuk meninggalkan rumah atau memiliki kehidupan mereka sendiri, sehingga mereka akan memilih tinggal di rumah yang kecil. Mereka merasa akan sulit untuk memulai sebuah keluarga di keadaan yang demikian. Kebanyakan mereka yang mengambil keputusan untuk childfree disebabkan oleh masalah personal, masalah finansial keluarga, latar belakang keluarga, ragu akan tumbuh kembang anak, hingga psikologi dari kedua orang tua.

b. Pemerintah Jepang & Childfree

Bagi beberapa orang keputusan untuk tidak ingin memiliki anak mungkin dianggap sebagai sebuah keputusan yang egois, namun bagi beberapa orang pilihan ini justru menjadi keputusan yang paling baik. Keputusan itu tidak hanya baik untuk orang tersebut agar mereka dapat lebih fokus dengan tujuan jangka panjang yang ingin mereka capai seperti

karir atau pendidikan, tetapi keputusan tersebut juga akan baik untuk anak yang nantinya lahir. Semua anak yang lahir di dunia pantas mendapatkan orang tua yang baik, banyak kasih sayang, serta dipenuhi segala kebutuhannya. Sayangnya tidak semua orang dan pasangan menikah mampu menjadi orang tua dan dapat memenuhi kebutuhan anak, baik dari segi kasih sayang maupun materi, sehingga di sini keputusan untuk menjadi *childfree* menjadi keputusan yang tepat. Memaksakan untuk memiliki anak di saat kita menyadari ketidakmampuan kita dalam mengurus anak justru akan menjadi keputusan yang lebih egois dan berdampak negatif pada diri sendiri, namun dampak tersebut akan lebih besar terhadap anak. Keputusan untuk *childfree* di beberapa negara mungkin tidak terlalu ditanggapi oleh pemerintahannya, tetapi bagi beberapa pemerintahan negara lain isu mengenai *childfree* menjadi penting.

Dalam beberapa tahun ini Jepang menjadi salah satu negara di Asia yang mengalami permasalahan mengenai rendahnya angka kelahiran. Hasil survey penduduk yang dilakukan sejak 2015 hingga 2020 menunjukkan hasil bahwa persentase penurunan jumlah populasi di Jepang adalah 0,7% atau sebesar 948.646 jiwa penduduk. Jepang saat ini hanya memiliki 11,9% penduduk usia anak dan 23% penduduk lanjut usia dari total penduduk Jepang yang berjumlah 126.146.099. Pada 2020, tingkat kelahiran di negara tersebut juga mengalami penurunan sebesar 9,2%. Beberapa ahli juga menilai bahwa dengan tingkat kelahiran yang rendah ini, di masa depan Jepang akan mengalami penurunan populasi secara drastis. Bagi Pemerintah Jepang permasalahan ini menjadi salah satu perhatian utama yang ingin segera diselesaikan sehingga ada banyak program yang digalakan oleh Pemerintah Jepang untuk mencapai tujuan tersebut. Beberapa langkah yang diambil oleh Pemerintah Jepang untuk meningkatkan angka kelahiran yakni dengan memberi bantuan sebesar 100.000 yen (Rp 12.600.000) untuk pasangan yang baru memiliki anak. Pemerintah Jepang juga mengadakan kampanye untuk suami dan ayah supaya mereka terlibat dalam pengerjaan pekerjaan rumah dan mengurus anak yang selama ini lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Tujuan yang ingin dicapai melalui program kampanye ini ialah supaya perempuan tetap dapat berkarir meskipun mereka memiliki anak, sehingga perempuan tidak perlu mengorbankan salah satu perannya. Negara dengan kemajuan teknologi tersebut juga memanfaatkan teknologi AI atau *Artificial Intelligence* untuk meningkatkan angka pernikahan yang nantinya diharapkan juga berdampak pada peningkatan angka kelahiran bayi di Jepang.

Jepang memang tidak dapat dikatakan sebagai sebuah negara dengan masyarakat yang konservatif secara keseluruhan, namun dari segi pemerintahan yang ada Jepang dapat disebut sebagai model pemerintahan yang konservatif. Di dalam kalangan masyarakat Jepang, keputusan untuk tidak memiliki anak memang sudah dianggap sesuatu yang biasa tapi hal ini berbeda dengan pandangan Pemerintah Jepang. Bagi Pemerintah Jepang keputusan *childfree* merupakan mimpi buruk, tidak ada hal baik yang datang dari keputusan tersebut. Semakin banyaknya warga Jepang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak akan berbahaya untuk keberlangsungan dan perkembangan Jepang karena di masa mendatang jumlah penduduk di usia produktif akan berkurang. Hal ini dikhawatirkan akan membawa Jepang pada permasalahan sosial dan ekonomi. Maka dari itu, ada berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk meningkatkan angka kelahiran. Salah satu Pejabat Pemerintahan Jepang, Toshihiro Nikai bahkan dengan berani menyebut bahwa keputusan untuk *childfree* merupakan keputusan yang egois. Menurutnya kunci

kebahagiaan setiap orang adalah dengan memiliki banyak anak bahkan di saat Jepang mengalami perang dan krisis pangan tidak ada keluarga yang berpikir untuk tidak memiliki anak sama sekali, oleh karena itu perempuan harus mau melahirkan anak. Apa yang dikatakan oleh Nikai justru bukan sesuatu yang dapat memotivasi masyarakat Jepang untuk memiliki anak karena pernyataannya justru sangat tidak sensitive. Nikai melupakan fakta bahwa beberapa orang atau pasangan tidak memiliki anak bukan karena mereka memilih keputusan tersebut secara sukarela, tetapi karena terpaksa oleh kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Selain itu kebahagiaan seseorang juga tidak dapat diukur hanya dengan melihat apakah orang tersebut memiliki anak. Ada yang tetap dapat hidup bahagia meskipun mereka tidak memiliki anak dan sebaliknya. Tidak hanya berhenti di situ, pernyataan tersebut juga melupakan adanya hak kebebasan setiap masyarakat Jepang untuk menentukan keputusan hidupnya sendiri termasuk mengenai anak dan jumlah anggota keluarga. Ia juga melupakan bahwa perempuan lah yang mengalami proses kehamilan dan melahirkan sehingga tidak seharusnya laki-laki menuntut perempuan untuk melahirkan banyak anak.

Kesimpulan

Perbedaan persepsi antara masyarakat dan Pemerintahan Jepang yang besar cukup terlihat. Masyarakat Jepang menerima adanya fenomena childfree karena realita masyarakat Jepang yang sibuk atas karir mereka dan juga besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk membesarkan anak, selain itu isu ketidaksetaraan gender dalam hal pembagian kerja dalam rumah tangga juga menjadi salah satu faktor pendorong, sedangkan Pemerintahan Jepang tampak menolak childfree meskipun tidak sampai melarang warga negaranya untuk tidak memiliki anak tetapi menyebut bahwa keputusan childfree merupakan sesuatu yang egois. Program-program yang diselenggarakan Pemerintahan Jepang dengan tujuan meningkatkan angka kelahiran bayi juga memiliki alasan tertentu. Childfree dapat dikatakan sebagai sebuah keputusan, bukan budaya yang akan memberikan dampak buruk bagi negara. Jika fenomena ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, dikhawatirkan akan terjadi penurunan angka umur produktif. Negara akan mengalami ketidakstabilan ekonomi. Begitu juga dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, namun tidak sebanding dengan angkatan kerja. Maka, ini akan mengundang para pekerja asing untuk bekerja di Jepang. Memang benar jika perempuan berhak untuk memutuskan menjadi perempuan yang “seutuhnya” atau menjadi diri mereka sendiri, namun tidak benar jika hal ini menjadi sebuah trend yang harus dikampanyekan sebagai bentuk gerakan feminisme.

Dalam menjelaskan fenomena childfree di Jepang, penulis dapat menyimpulkan perjuangan perempuan Jepang menurut feminisme eksistensialis di lingkup domestik yakni dalam rumah tangga dalam ruang kerja. Perjuangan yang dimaksud adalah bagaimana perempuan Jepang berupaya untuk menjadi dirinya sendiri karena mereka ingin, namun tindakan ini juga dipengaruhi oleh faktor sosial. Berdasarkan teori feminisme eksistensialis keputusan untuk *childfree* merupakan hak semua orang khususnya untuk perempuan. Otoritas tubuh perempuan ada pada kendali perempuan itu sendiri, bukan pada laki-laki atau masyarakat yang menciptakan konstruksi sosial yang membatasi perempuan, bahkan pemerintah. Di Jepang salah satu alasan mengapa perempuan memilih untuk tidak memiliki

anak tidak hanya karena alasan ekonomi, tetapi juga karena dibatasinya peranan perempuan dalam masyarakat. Perempuan Jepang dipaksa oleh masyarakat untuk memilih ingin menjadi wanita karir atau ibu rumah tangga, saat perempuan yang memiliki anak tetap berkarir maka hal tersebut menjadi salah. Padahal tidak ada salahnya juga perempuan tetap berkarir meskipun mereka menjadi ibu dan memiliki anak, dalam rumah tangga tugas mengurus anak dan pekerjaan rumah bukan hanya dimiliki perempuan tetapi juga laki-laki. Selama ini masyarakat melanggengkan tradisi untuk mengatur perempuan harus seperti apa karena perempuan dianggap sebagai objek yang ada untuk orang lain, bukan manusia yang lahir dan ada untuk dirinya sendiri. Sangat tidak adil saat laki-laki dapat menjadi ayah dan suami tetapi tetap dapat memiliki karir sedangkan perempuan tidak. Perempuan dapat menjadi apapun yang mereka mau, mengambil keputusan apapun yang membuat mereka bahagia dan merasa utuh sebagai manusia yang bebas dari konstruksi sosial masyarakat.

Perlu diakui memang bahwa semakin sedikit tingkat kelahiran di suatu negara akan membawa dampak buruk bagi ekonomi dan kehidupan sosial. Oleh karena itu apa yang diupayakan Pemerintah Jepang untuk meningkatkan tingkat kelahiran memang tepat, selama tidak ada unsur paksaan atau hukuman denda bagi orang-orang yang memutuskan untuk tidak ingin memiliki anak. Hal yang disayangkan adalah pernyataan salah satu Pejabat Pemerintahan Jepang yang menilai keputusan untuk *childfree* merupakan sesuatu yang egois. Menurut penulis keputusan *childfree* tidak dapat dikatakan sebagai keputusan yang egois karena menjadi orang tua dan memiliki anak merupakan pekerjaan dengan tanggung jawab yang besar dan berat. Tidak semua orang sanggup untuk mengambil peran sebagai orang tua. Perlu diingat bahwa setiap warga Jepang memiliki kebebasan untuk menentukan hidup mereka sendiri, termasuk mengenai anak dan besar kecilnya keluarga. Dibanding menilai keputusan untuk *childfree* merupakan sesuatu yang egois, akan lebih baik apabila Pemerintah Jepang fokus untuk mengurai faktor-faktor yang membuat banyak warga negara mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak. Pemerintah Jepang dapat mengupayakan membangun lingkungan kerja yang sehat dengan jam kerja yang tidak terlalu panjang dan beban kerja yang tidak terlalu berat. Selain itu dapat pula dengan menurunkan sedikit biaya hidup seperti untuk makanan dan tempat tinggal yang selama ini masih dinilai paling banyak menghabiskan dana. Mengampanyekan serta mensosialisasikan mengenai kesetaraan gender juga menjadi penting supaya perempuan di Jepang tidak perlu mengorbankan karirnya saat ia telah menikah dan memiliki seorang anak.

Bibliografi

- Associated Press. (2018, Juni 27). Lawmaker slammed for calling people without children selfish. Diakses pada 8 Desember 2021, dari <https://nypost.com/2018/06/27/lawmaker-slammed-for-calling-people-without-children-selfish/>
- Baseel, Casey. (2021, Januari). Tokyo's latest plan to boost birth rate: Pay people 100,000 yen per baby they give birth to. Diakses pada 8 Desember 2021, dari <https://japantoday.com/category/features/lifestyle/Tokyo%E2%80%99s-latest-plan-to-boost-birth-rate-Pay-people-100-000-yen-per-baby-they-give-birth-to>

FENOMENA CHILDFREE DI JEPANG DALAM PERSPEKTIF TEORI FEMINISME EKSISTENSIALIS

- BBC. (2020, Desember 8). Japan to fund AI matchmaking to boost birth rate. Diakses pada 8 Desember 2021, dari <https://www.bbc.com/news/world-asia-55226098>
- BCCJ Acumen. (2015, November). Japan's new dinks break trends. Diakses pada 4 Desember 2021, dari <https://bccjacumen.com/news/japans-new-dinks-break-trends/>
- Dennis-Embury, Tom. (2018, Juni 27). Childless couples are 'selfish', senior Japanese politician says. Diakses pada 8 Desember 2021, dari <https://www.independent.co.uk/news/world/asia/japan-birth-rate-parents-children-childless-toshihiro-nikai-liberal-democratic-party-a8419346.html>
- Faridah, S. (2021, Agustus 24). Childfree: Fenomenan childfree dan konstruksi masyarakat Indonesia. Diakses pada 4 Desember 2021, dari <https://heylawedu.id/blog/childfree-fenomena-childfree-dan-konstruksi-masyarakat-indonesia>
- FertilitySmarts. Childfree. Diakses pada 4 Desember 2021, dari <https://www.fertilitysmarts.com/definition/1152/childfree>
- HAJIR, MOHAMMAD (2020) *Bias Gender Dalam Buku Teks Bahasa Indonesia Sma Kurikulum 2013 Edisi Revisi*. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Huang, Silvia. (2020, Juni 21). 5 Facts About Healthcare in Japan. Diakses pada 7 Desember 2021, dari <https://borgenproject.org/healthcare-in-japan/>
- Japan Educational Travel. JAPANESE EDUCATIONAL SYSTEM. Diakses pada 7 Desember 2021, dari <https://education.jnto.go.jp/en/school-in-japan/japanese-education-system/>
- Kobayashi, Nobuko. (2021, Mei 29). Men must change to reverse Japan's rapidly declining birthrate. Diakses pada 8 Desember 2021, dari <https://asia.nikkei.com/Opinion/Men-must-change-to-reverse-Japan-s-rapidly-declining-birthrate>
- Kyodo News. (2021, Mei 4). Japan's child population hits record low after 40 years of decline. Diakses pada 4 Desember 2021, dari <https://www.thejakartapost.com/news/2021/05/04/japans-child-population-hits-record-low-after-40-years-of-decline.html>
- Live Japan. (2019, Desember 12). Is Japan Really a Safe Country? Let's Take a Look at How Their Crime Rate Compares to the Rest of the World! Diakses pada 7 Desember 2021, dari <https://livejapan.com/en/article-a0002373/>
- Media Indonesia. (2021, September 2). Fenomena childfree di Indonesia. Diakses pada 4 Desember 2021, dari <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fenomena-childfree-di-indonesia>
- Muliana A, V. (2018, Maret 16). Ingin tambah populasi, kota di Jepang ini bayar Rp 36,7 juta untuk wanita hamil. Diakses pada 4 Desember 2021, dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3376480/ingin-tambah-populasi-kota-di-jepang-ini-bayar-rp-367-juta-untuk-wanita-hamil>
- NHK World-Japan. (2021, Desember 1). Japan's population continues to decline. Diakses pada 4 Desember 2021, dari https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20211201_05/
- Nippon. (2020, Juli 7). Marriage statistics in Japan: Average age of couple continues to rise. Diakses pada 4 Desember 2021, dari <https://www.nippon.com/en/japan-data/h00759/>

- Pratama, Novrian. (2021, Agustus 23). Childfree dan Dampaknya Bagi Negara. Diakses pada 9 Desember 2021, dari <https://kumparan.com/novrian-pratama/childfree-dan-dampaknya-bagi-negara-1wNy0mVmVhR>
- Tim detikcom. (2021, Agustus 16). Gita Savitri ungkap alasan tak mau punya anak. Diakses pada 4 Desember 2021, dari <https://hot.detik.com/celeb/d-5683516/gita-savitri-ungkap-alasan-tak-mau-punya-anak>
- Aisyah, N. DetikEdu (2021, September 23). Ini Penyebab Jepang Alami Penurunan Jumlah Penduduk, Siswa Sudah Tahu?. Diakses pada 4 Desember 2021, dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5735856/ini-penyebab-jepang-alami-penurunan-jumlah-penduduk-siswa-sudah-tahu>
- Prameswari, N. P. L. M., Nugroho, W. B., & Mahadewi, N. M. A. S. (2019). Feminisme Eksistensial Simone De Beauvoir: Perjuangan Perempuan di Ranah Domestik. *Jurnal Ilmiah Sosiologi*, 1(2).
- Oecd.org. Better Life Index. Diakses melalui <https://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/japan/> pada tanggal 13 Desember 2021
- Wingfield, Rupert. 2013. Japan: The Worst Developed Country for Working Mothers?. Diakses melalui <https://www.bbc.com/news/magazine-21880124> pada tanggal 13 Desember 2021
- Internations.org. 2020. The Cost of Living in Japan. Diakses melalui <https://www.internations.org/go/moving-to-japan/living/the-cost-of-living-in-japan> pada tanggal 13 Desember 2021.
- Christiansen, Shawn L, dkk. 2013. A Nation Without Children: A Discussion of Fertility Decline in Japan. Diakses melalui <https://www.ncfr.org/ncfr-report/focus/family-focus-global-families/nation-without-children-discussion-fertility-decline-> pada tanggal 13 Desember 2021.